



MENUMBUHKAN SIKAP NASIONALISME WARGA NEGARA MUDA DI ERA GLOBALISASI MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI

(Studi pada Mahasiswa PGSD UAD)

Lisa Retnasari¹, Yayuk Hidayah²

Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta Indonesia^{1,2}

Email: lisa.renasari@pgsd.uad.ac.id¹, yayuk.hidayah@pgsd.uad.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran strategis pendidikan kewarganegaraan dalam menumbuhkan sikap nasionalisme warga negara muda di era globalisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah survei. Hasil penelitian menunjukkan, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi dapat berkontribusi dalam menumbuhkan nasionalisme dengan nilai-nilai Pancasila memiliki peran yang sangat penting untuk warga negara muda. Pendekatan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan lebih interaktif melalui model pembelajaran *problem based learning*. Proses pembelajaran dengan model PBL agar lebih maksimal pendidik harus memiliki kompetensi wawasan yang luas.

Kata Kunci: *Pendidikan Kewarganegaraan, Nasionalisme, Warga negara muda, Globalisasi*

Abstract

This study aims to determine the strategic role of Citizenship Education in fostering the attitude of nationalism of young citizens in the era of globalization. The research method used is a survey. The results showed. Citizenship Education in higher education can contribute to fostering nationalism with the values of Pancasila has a significant role for young citizen. Citizenship education learning approaches are more interactive through the problem-based learning model. In the learning process with the PBL model so that the maximum educator must have broad insight competencies.

Keywords: *Citizenship Education, Nasionalism, Young Citizens, Globalization.*

@Jurnal Basicedu Prodi PGSD FIP UPTT 2020

✉ Corresponding author :

Address :-

Email :-

Phone :-

ISSN 2580-3735 (Media Cetak)

ISSN 2580-1147 (Media Online)

PENDAHULUAN

Artikel penelitian ini berusaha mendeskripsikan usaha menumbuhkan sikap nasionalisme warga negara muda di era globalisasi melalui Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Tujuannya mengembangkan potensi peserta didik menjadi bagian warga negara yang baik dan terdidik (*good citizen*) memiliki iman dan Takwa kepada Tuhan YME, berilmu, sehat, mandiri, kreatif, demokratis dan bertanggungjawab. Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib memuat Pendidikan Kewarganegaraan yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air sesuai dengan Pancasila dan UUD 194. Pendidikan kewarganegaraan juga merupakan wujud bela negara selain melalui pelatihan kemiliteran, pengabdian TNI dan pengabdian sesuai profesi.

Pada tingkat Perguruan Tinggi, Pendidikan Kewarganegaraan dimunculkan dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Menurut pasal 3 Keputusan Dirjen Dikti No.43 tahun 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi mengungkapkan bahwa PKn dirancang untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga negara serta pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bekal agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Berdasarkan keputusan tersebut sifat dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan wajib menjadi bagian dalam kurikulum perguruan tinggi. Tujuan mata kuliah

pendidikan kewarganegaraan yakni membentuk mahasiswa yang handal menjadi seorang profesional atau ilmuwan yang demokratis, cinta tanah air, daya saing tinggi, disiplin, bertanggungjawab, memiliki kontribusi membangun bangsa dalam bingkai keberagaman berdasarkan nilai Pancasila.

Namun kenyataannya masih banyak pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) sepanjang tahun 2018 di Indonesia (Setara Institute, 2019). Lebih tepatnya ada 202 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB). Lunturnya solidaritas dan keberanian dalam mengekspresikan perbedaan menjadi titik melemahnya intoleransi. Gerakan transasional yang anti Pancasila meskipun sudah dibubarkan ternyata masih menjamur di kampus-kampus. Ada 9,2 % responden Indonesia setuju mengganti NKRI menjadi sistem khilafah (SMRC). Radikalisme mengantarkan intoleransi dan terkikisnya nasionalisme warga negara. Berkembangnya paham yang melunturkan nasionalisme dengan lebih mengedepankan kepentingan pribadi dan golongan di atas kepentingan bangsa masih menjadi catatan kelam keadaan sosial. Berbagai gerakan penolakan sistem demokrasi sebagai sistem pemerintah berjalan terstruktur dan masif. Paham tersebut tidak hanya tumbuh di masyarakat, namun juga di kalangan mahasiswa dan pelajar. Kondisi keberagaman yang dialami bangsa Indonesia saat ini merupakan dampak adanya kultur yang terus menerus (globalisasi). Kenyataan keberagaman ini rentan konflik baik vertikal maupun horizontal. Oleh karenanya warga negara muda Indonesia harus mempunyai kompetensi dan sikap untuk mampu berfikir, mampu mendengarkan, kecakapan sosial, mampu mengungkapkan pendapat dan pengendalian diri (Wahab & Sapriya, 2011: 207)

Globalisasi membuat dunia nampak kecil, jarak lebih pendek, peristiwa disuatu tempat mudah tersebar. Globalisasi membawa tiga kecenderungan yakni homogenisasi, hibridisasi dan perbedaan dalam aspek kehidupan (Kalidjernih, 2011: 63). Homogenitas terjadi dengan ditandai masyarakat

Indonesia secara luas menggunakan merk-merk barat meskipun tidak asli. Hibridisasi berlangsung dengan adanya produk global yang diadaptasi dan dimodifikasi oleh dan untuk kondisi lokal dengan kata lain percampuran kultur dan gaya hidup. Kecenderungan globalisasi mengikis nilai-nilai luhur bangsa. Hal ini ditandai dengan banyaknya generasi muda lebih menyukai produk global, budaya asing dan busaya *hedonisme*. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia memiliki misi pengembangan *smart and good citizen*. Pendidikan kewarganegaraan dalam konteks paradigma baru memberi penekanan untuk membentuk warga negara yang tidak hanya mengetahui hak dan kewajiban. Namun lebih dari itu, membentuk warga negara yang cerdas memiliki civic intellegences, civic responsibility dan civic partisipation salam sebuah kebijakan publik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti berharap hasil penelitian mengenai menumbuhkan sikap nasionalisme warga negara muda di era globalisasi melalui Pendidikan ini dapat berkontribusi dalam memberikan gambaran nasionalisme warga negara muda di era globalisasi lebih khusus pada mahasiswa PGSD UAD.

Penelitian kuantitatif mengenai gambaran faktual pemahaman wawasan nusantara dengan melibatkan 1200 mahasiswa yang mengikuti perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Medan menghasilkan bahwa kecenderungan nasionalisme mahasiswa berada di tingkatan sedang yaitu 38,3% (Setiawan, 2017). Sementara itu kajian literatur nasionalisme dan melunturnya semangat bela negara menyimpulkan bahwa substansi nasionalisme Indonesia ada dua unsur yaitu persatuan dan kesatuan yang berupa Indonesia terdiri dari keragaman (suku,agama) dan kesadaran bersama dalam menghapus penjajahan, penindasan dari bumi indonesia (Irfani, 2016) lebih lanjut penelitian terhadap kontribusi model *project citizen* dalam menumbuhkan nasionalisme mahasiswa di PGMI UIN AR-Raniry Banda Aceh menghasilkan bahwa penggunaan model *project*

citizen dapat meningkatkan kecakapan kewarganegaraan mahasiswa (Maksum, 2015). Hasil *library research* yang mengkaji mengenai peluang dalam menumbuhkan sikap nasionalisme melalui Pendidikan Kewarganegaraan dengan berbasis kearifan lokal menghasilkan bahwa, dengan Pendidikan Kewarganegaraan berbasis kearifan lokal dapat mengehasilkan *output* yang dapat berfikir kritis,bertidak cerdas, bertanggung jawab dan menjaga persatuan dan kesatuan (Bria, 2018). Berdasarkan hasil kajian tersebut, belum ada yang meneliti mengenai menumbuhkan sikap nasionalisme mahasiswa melalui Pendidikan Kewarganegaraan, lebih khusus pada mahasiswa PGSD UAD.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini menfokuskan pada pertanyaan penelitian 1) bagaimana kontribusi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi dalam menumbuhkan sikap nasionalisme warga negara muda? 2) bagaimana pemahaman nasionalisme mahasiswa PGSD UAD?

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey. Penelitian survey merupakan penelitian dengan menggunakan angket yang diberikan pada populasi besar ataupun kecil sehingga menemukan relatif, distribusi, dan hubungan antar variabel (Sugiyono, 2013). Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara sistematis gambaran terkait fakta, sifat dan hubungan mengenai pendidikan kewarganegaraan dan nasionalisme. Instrumen yang digunakan adalah instrumen tertutup dengan skala *likert*. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa PGSD UAD sejumlah 95 mahasiswa

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan peneliti secara langsung membahas antara temuan lapangan kuantitatif dan kualittaif dengan teori yang ada. Secara garis besar bab hasil dan pembahasan adalah cakupan jawaban dari rumusan masalah yaitu 1) bagaimana kontribusi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi

dalam menumbuhkan sikap nasionalisme warga negara muda? 2) bagaimana pemahaman nasionalisme mahasiswa PGSD UAD?

Kontribusi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi dalam menumbuhkan sikap nasionalisme warga negara muda memiliki peran yang strategis. Pendidikan kewarganegaraan yang erat kaitnya dengan konteks politik atau tidak bisa lepas dari pengaruh rezim politik perlu di revitalisasi dan reorientasi. Melihat perjalanan pendidikan kewarganegaraan yang berubah di Indonesia sejak 1957 hingga kini menggunakan kurikulum 2013. Meskipun nama mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan berubah-ubah dengan kurikulum yang berbeda-beda, tidak menghilangkan peran vital pendidikan kewarganegaraan sebagai pembentuk karakter bangsa. Hakikat pendidikan yakni membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, kecenderungan, ilmu teknologi dan membentuk jati diri berdasarkan sistem nilai Pancasila. Penjelasan UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menjadi poin penting dalam menumbuhkan rasa nasionalisme melalui pendidikan kewarganegaraan dengan membentuk warga negara yang cinta dan rasa kebangsaan terhadap bangsa tinggi. Pendidikan kewarganegaraan ditempatkan dalam konteks operasional untuk mencetak generasi muda yang dilandasi wawasan kebangsaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa mengungkapkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memberikan pemahaman terkait nasionalisme. Pendidikan kewarganegaraan membelajarkan tentang bagaimana menghargai orang lain, memperat tali persaudaraan dan menjunjung tinggi kesatuan sebagai prinsip hidup bersama dalam keberbedaan.

Warga negara yang akan dihasilkan dari pendidikan kewarganegaraan adalah manusia yang merdeka, memahami perjalanan sejarah bangsa, cita-cita luhur dan tujuan suatu negara (Sanusi 1999). Selain itu, pendidikan kewarganegaraan sarat akan

pendidikan nasionalisme artinya rasa kebangsaan dapat ditingkatkan melalui pendidikan kewarganegaraan capainya peserta didik merasa bangga, cinta dan rela berkorban untuk negaranya (Bunyamin, 2008:137). Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata kuliah institusional di Universitas Ahmad Dahlan sesuai SK Rektor No 96 tahun 2015 pendidikan kewarganegaraan memiliki bobot 2 SKS. Pendidikan kewarganegaraan di UAD melalui tiga tahapan yakni persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Secara keseluruhan proses pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan secara khusus di PGSD sudah berjalan baik, seperti yang diungkapkan dosen mata kuliah institusional (MKI) setiap memulai semester dilakukan rapat khusus dosen MKI. Pembahasan rapat terkait persamaan persepsi materi yang diajarkan, model pembelajaran yang digunakan, komponen nilai yang ditentukan dan evaluasi.

Prodi pendidikan guru sekolah dasar (PGSD) merupakan miniatur Indonesia yang beranekaragam, baik suku dan adat istiadat. Temuan penelitian di PGSD menunjukkan proses belajar pendidikan kewarganegaraan dilakukan berbasis pengalaman guna mengasah *sense of social*. Beberapa kegiatan yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh dosen dengan mengunjungi museum, mengunjungi kampung Pancasila, mengunjungi panti asuhan, mengunjungi pondok pesantren, mengunjungi asrama mahasiswa dari luar Yogyakarta dll. Ketika berbicara identitas nasional mereka langsung belajar dari masyarakat untuk membuktikan sejauh mana pemahaman masyarakat terkait identitas nasional. Ketika mendalami nilai-nilai yang terkandung mereka langsung belajar dari narasumber di kampung Pancasila. Kegiatan tersebut sebagai wujud menumbuhkan sikap sebagai warga negara yang bertanggungjawab. Selain itu juga melahirkan manusia yang humanis dan partisipatoris menjadikan kegiatan kunjungan ke panti asuhan, kampung pancasila, pondok pesantren dan asrama berbasis

kesukuan sebagai laboratorium pembumian nilai-nilai luhur bangsa.

Temuan tersebut menguatkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Morais dan Ogden (2011) mengenai dimensi-dimensi kewarganegaraan dapat dikembangkan dalam pembelajaran di sekolah. Peserta didik dapat belajar dengan gurunya untuk mengasah kompetensi untuk menjadi warganegara yang terdidik. Adapun dimensi utama yang menjadi kompetensi warga negara yakni tanggungjawab sosial, kompetensi global dan keterlibatan dalam kewargaan global. Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan menekankan proses pembelajaran yang demokratis dan kolaboratif, pembelajaran berupa hafalan teori seperti pendidikan dimasa lalu kini dihindari. Pendidikan kewarganegaraan yang berproses dari *learning by doing and learning together* dimaksudkan agar menciptakan warga negara yang berfikir kritis dan bertindak demokratis.

Kompetensi warga negara yang baik juga diungkap oleh Branson (1998), yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan watak/sikap kewarganegaraan (*civic dispositions*). Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan dosen MKI sikap nasionalisme nampak ketika berlangsung pembelajaran di kelas yang menampilkan isu-isu nasionalisme yang berkembang di masyarakat. Seperti kasus korupsi, kasus ideologi transnasional, kasus pemilu dan sebagainya. Mahasiswa aktif mampu berfikir kritis dalam memecahkan masalah secara demokratis sebagai modal menumbuhkan *civic knowledge*. Pendidikan kewarganegaraan memiliki ruang lingkup yang berorientasi politik baik sikap dan perilaku politik. Adapun kompetensi yang dapat dimiliki seseorang yang belajar pendidikan kewarganegaraan yakni pengetahuan politik, kesadaran, sikap, partisipasi politik dan mengambil keputusan yang bersifat rasional.

Ruang lingkup pengetahuan dan pemahaman kenegaraan menjadi wujud kompetensi *civic knowledge*. Selanjutnya warga negara muda yang memiliki *civic skil* meliputi keterampilan *intelligences* dan berpartisipasi aktif mengambil peran publik. Kemudian yang terakhir yakni *civic disposition* yang memiliki makna karakter baik yang harus dimiliki warga negara muda. Karakter yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai cerminan warga negara Indonesia. Kompetensi pendidikan kewarganegaraan tersebut bertujuan preventif menanggulangi dampak negatif globalisasi, sehingga melahirkan warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*).

Pengembangan kompetensi *good citizen* menjukan bahwa pendidikan kewarganegaraan bersifat multidimensi dalam ranah yang akan dikembangkan. Perkembangan pendidikan kewarganegaraan masa kini interpretasi maksimal. Dengan kata lain, Osler dan Starkey mengemukakan bahwa pendidikan kewarganegaraan bersifat maksimal sebagai modal peserta didik untuk mampu mengambil peran publik dengan penuh tanggungjawab (Bourke dkk, 2012:163) Pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu menjadi solusi dalam memecahkan konflik nasionalisme yang bersifat vertikal maupun horizontal secara kritis dan demokratis. Konflik vertikal antara elit dan massa sering terjadi karena kebijakan yang tidak pro dengan rakyat, ketidakadilan pembangunan dan kesenjangan sosial. Konflik horizontal dilatarbelakangi suku, ras, agama dan antar golongan (SARA) masih menjadi catatan hitam di Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun setara institute ada 202 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB). Pendidikan kewarganegaraan membelajarkan terkait materi integrasi nasional guna menumbuhkan kesadaran identitas nasional, menguatkan identitas bersama dan membangun persatuan di tengah perbedaan, sehingga mencetak warga negara muda yang nasionalis. Materi nasionalisme pada pendidikan kewarganegaraan

terintegrasi dalam muatan materi identitas nasional, integrasi nasional, wawasan nusantara dan ketahanan nasional (bela negara). Guna membangun visi manusia yang cerdas dan bertanggungjawab PKn tetap memuat nilai-nilai luhur bangsa yakni Pancasila dan di dalamnya nilai-nilai nasionalisme.

Pendekatan dan prinsip pembelajaran pendidikan kewarganegaraan perlu reorientasi. Menghindari mahasiswa yang belajar PKn hanya untuk mencari nilai (skor) saja tanpa memahami materi yang diajarkan. Padahal PKn erat kaitannya dengan pendidikan nilai. Berdasarkan penelitian masih ada mahasiswa yang kurang antusias dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan menganggap PKn sebagai mata kuliah wajib saja. Karena bukan termasuk bidang keilmuan yang mereka tekuni. Menyajikan pendidikan kewarganegaraan dalam internalisasi nilai Pancasila dan nasionalisme dapat dilakukan dengan pembelajaran PKn yang penuh makna. Berkaitan dengan pendidikan nilai Herman (2002) secara teoritik mengungkapkan “...*value is neither taught not cought it is learned*” yang artinya substansi nilai tidak hanya teori atau diajarkan, tetapi lebih jauh ditangkap, diinternalisasi dan dibakukan dalam kualitas pribadi seseorang melalui proses belajar. Menuju pendidikan kewarganegaraan yang maksimal yakni dengan membuat suasana kelas yang demokratis. Selain itu berbicara HAM tidak hanya materi yang harus diselesaikan melalui membaca sumber referensi. Namun penghargaan akan hak asasi diaktualisasikan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Pengalaman mahasiswa sebagai bahan kajian untuk membahas secara mendalam apa itu HAM dan memecahkan masalah bersama melalui diskusi kelas. Model pembelajaran dengan paradigma baru pendidikan kewarganegaraan dikembangkan dengan model interkatif, guna menstimulus berfikir mahasiswa secara kritis.

Berdasarkan temuan penelitian dosen dalam menumbuh kembangkan pemikiran kritis dan demokratis mahasiswa menggunakan model

pembelajaran *problem based learning*. Problem based learning adalah model pembelajaran berbasis masalah sesuai dengan temuan yang ada di lapangan sebagai dasar untuk memperoleh konsep dan pengetahuan melalui alur berfikir kritis (Fakriyah, F,2014:96). Pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dalam bab demokrasi dengan menggunakan PBL dimulai dari sinopsis model personal sosial politik yang demokratis dan bertanggungjawab. Pembelajaran ini memfasilitasi peserta didik untuk mengetahui, memahami, meyakini dan menjalankan nilai-nilai yang terkandung hak dan kewajiban sebagai warga negara. Mengasah kepekaan, tanggapan, empatik, argumentatif dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya kompetensi nilai yang akan dikembangkan tadi harus di dasarkan keyakinan dan didukung dengan pemahaman secara utuh dalam praktik kehidupan sehari-hari. Sintematik memiliki langkah pembelajaran dari pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Pendidik dalam menggunakan model PBL harus memiliki kompetensi wawasan yang memadai tentang tema, membuka dan menutup pembelajaran secara ilustratif dan inspiratif, keterampilan bertanya dasar dan lanjut, menjelaskan konsep, mengorganisasi kelompok diskusi dan penguatan personal serta kelompok (Winataputra, 2007:184-185).

Pemahaman nasionalisme mahasiswa PGSD UAD melau survey menghasilkan berbagai temuan. Generasi muda merupakan ujuk tombak bangsa Indonesia memegang tongkat estafet sebagai generasi penerus. Rentan usia warga negara muda yakni 0-30 tahun (Kristiono, 2017). Warga negara muda sebagai generasi penerus memiliki kewajiban menularkan nasionalisme. Mereka diharapkan mampu memberi kontribusi yang konstruktif dalam menumbuhkan sikap nasionalisme yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Setelah menempuh matakuliah PKn 2 SKS, mahasiswa mengisi angket terkait pemahaman nasionalisme. Jumlah mahasiswa yang berpartisipasi sebanyak 95 orang menggunakan *random sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa arti nasionalisme menurut mahasiswa adalah satu paham untuk menciptakan identitas bersama sebagai konsep menjadikan kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita bangsa. Kolektivitas dalam mencintai tanah air menjadi cerminan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara, teridentifikasi bahwa meletakkan kepentingan bangsa dalam wujud bela negara dan cinta tanah air dimaknai sebagai nasionalisme. Ajaran untuk mencintai tanah air dan kesadaran anggotanya secara kolektivisme bersifat ontegritas, mempertahankan kemakmuran dan kekuatan bangsa. Nasionalisme menunjukan keunggulan kelompok berdasarkan kesamaan bahasa, budaya dan wilayah.

Adapun bentuk-bentuk perilaku nasionalisme menurut Asmorojati, A & Avanti Vera R.P (2018:188) yakni cinta untuk negara, menjaga keadulatan bangsa, memahami keberagaman dan memahami atauran hukum yang berlaku. Dari hasil penelitian dengan menggunakan angket dan wawancara menemukan pemahaman mahasiswa terkait nasionalisme terdiri dari mengetahui peraturan perundang-undangann, menaati peraturan perundang-undangan, menggunakan produk dalam negeri dan cinta tanah air sebagai berikut.

Tabell: Tahu peraturan perundang-undangan

Saya tahu peraturan perundang-undangan Indonesia		
Pilihan Jawaban	Frequeny	Percent
Sangat Setuju	6	6,3%
Setuju	73	76,8 %
Tidak Setuju	16	16,8 %
Sangat Tidak Setuju	0	0
Total	95	100

Peneliti telah memberikan kuesioner terhadap 95 mahasiswa PGSD UAD dan di dapat hasil, Pada pernyataan mengenai tahu aturan perundang-

undangan di Indonesia, berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa 6,3% menyatakan sangat setuju, 76,8% menyatakan setuju, selain itu 16,8% menyatakan tidak setuju atau dengan kata lain belum mengetahui peraturan perundang-undangan

Temuan kuantitatif ini memberikan gambaran bahwa mayoritas mahasiswa mengetahui peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pemahaman peraturan perundang-undangan memiliki peran untuk menjaga ketertiban dalam hidup berbangsa dan bernegara. Indonesia merupakan negara hukum yang pembentukan perundang-undanganya bersumber pada nilai-nilai Pancasila (Febriansyah, 2016). Kebermanfaatn peraturan perundang-undangan bagi warga negara antara lain melindungi warga negara, memberikan rasa aman, kepastian hukum dan ketertiban.

Tabel 2: Menaati perundang-undangan

Saya Menaati Peraturan Perundang-undangan		
Pilihan Jawaban	Pilihan Jawaban	
Sangat Setuju	23	24,2%
Setuju	63	66,3 %
Tidak Setuju	3	9,4 %
Sangat Tidak Setuju	0	0
Total	95	100

Berdasarkan tabel 2 di dapat hasil 24,2 % menyatakan sangat setuju, 66,3 % menyatakan setuju dan 9,4% menyatakan tidak setuju. Temuan ini menggambarkan bahwa menaati peraturan merupakan salah satu wujud nasionalisme bagi mahasiswa. Berdasarkan hasil wawanacara, bahwa pengalaman pada diri individu membentuk konsepsinya sendiri mengenai makna Indonesia. Pengalaman dapat merumuskan identitas

keindonesiaan seseorang (Pujiriyani, 2013) selanjutnya, mahasiswa berdasarkan hasil temuan mengkonsepsikan bahwa mengetahui peraturan yang berlaku, merupakan bentuk nasionalisme. Menaati peraturan menjadi salah satu wujud nasionalisme karena dengan menaati peraturan adalah sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Sebagai warga negara muda, menjaga persatuan melalui konsistensi menaati peraturan dapat menumbuhkan rasa bangga terhadap jati diri bangsa. Dari hasil wawancara salah bentuk menaati peraturan perundang-undangan yakni tertib berlalu lintas, tidak menghina negara, tidak menghina pemimpin negara, dan tidak menghina warga negara Indonesia.

Tabel 3: menggunakan produk dalam negeri

Saya Menggunakan Produk Dalam Negeri		
Pilihan Jawaban	Frequency	Percent
Sangat Setuju	16	16,8%
Setuju	66	69,4%
Tidak Setuju	13	13,6%
Sangat Tidak Setuju	0	0
Total	95	100

Berdasarkan Tabel 3 hasil menunjukkan bahwa 16,8% menyatakan sangat setuju, 69,4% menyatakan setuju dan 13,6% menyatakan tidak setuju. Pernyataan menggunakan produk dalam negeri merupakan wujud nasionalisme juga tersirat dalam hasil wawancara. Menggunakan produk dalam negeri mempunyai beberapa manfaat antara lain meningkatkan pendapatan negara, meluaskan lapangan pekerjaan, menjaga kesejahteraan dan

meningkatkan kualitas produk (Mall Online Indonesia, n.d.) dalam sebuah studi mengenai menggunakan produk dalam negeri di delapan negara di dapat hasil bahwa terdapat berbagai evaluasi terhadap produk dalam negeri yaitu integritas produk, harga, keberadaan pasar, dan respons pasar (Papadopoulos, A.Heslop, & Bamossy, 1990) dalam konteks Indonesia, setidaknya ada delapan (8) produk Indonesia yang telah mendunia dan membuat bangga yaitu, Tolak Angin, Indomie, Kopiko, Equil, Extra Joss, Silver Queen, Kopi Kapal Api, La Fonte (IDN TIMES, n.d.).

Tabel 4: mencintai tanah air indonesia

Saya Mencintai Tanah Air Indonesia		
Pilihan Jawaban	Frequency	Percent
Sangat Setuju	61	64,2%
Setuju	31	32,6 %
Tidak Setuju	3	3,1 %
Sangat Tidak Setuju	0	0
Total	95	100

Pada Tabel 4 di dapat hasil bahwa pada pernyataan mencintai tanah air Indonesia di dapat hasil 64,2% menyatakan sangat setuju, 32,6% menyatakan setuju dan 3,1% menyatakan tidak setuju. Pemahaman nasionalime mahasiswa PGSD UAD secara kognitif mengikuti bagaimana pengetahuan yang di dapat mahasiswa. Perkembangan kognitif menyangkut perkembangan kegiatan berpikir itu bekerja (Syaodih & Agustin, 2008) berdasarkan hasil wawancara terhadap mahasiswa PGSD UAD, mayoritas mereka menyatakan kebanggaannya sebagai bangsa Indonesia.

Temuan ini mengidentifikasi bahwa pemahaman nasionalisme warga negara muda yakni secara kognitif meliputi bangga menjadi warga negara Indonesia, mengetahui peraturan yang berlaku, cinta tanah air, menggunakan produk dalam negeri. Perkembangan kognitif menyangkut perkembangan kegiatan berpikir itu bekerja (Syaodih & Agustin, 2008) berdasarkan hasil wawancara terhadap mahasiswa PGSD UAD, mayoritas mereka menyatakan kebanggaannya sebagai bangsa Indonesia. Hal ini terbukti dari pemahaman kognitif tentang keberagaman di Indonesia yang multikultur menjadi alasan untuk mereka tidak membedakan teman dengan latar belakang suku, agama dan budaya yang berbeda. Berkomunikasi dengan menggunakan bahasa persatuan, saling menghormati sesama manusia, menghargai perbedaan pendapat, mengetahui lagu-lagu kebangsaan dan memahami dasar negara Indonesia..

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, kesimpulan dalam penelitian ini adalah pendidikan memiliki peran strategis dalam menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme pada generasi muda di Indonesia. Kontribusi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi dalam menumbuhkan nasionalisme dengan nilai-nilai Pancasila memiliki peran yang sangat penting. Misi dan tujuan pendidikan kewarganegaraan di era globalisasi perlu memperluas ranah hingga maksimal. Membangun kemampuan berfikir kritis sistematis, kemampuan bekerjasama dengan orang, memiliki tanggung jawab dan mampu menyelesaikan konflik tanpa kekerasan yang dilandasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pendekatan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan lebih interaktif melalui model pembelajaran *problem based learning* menjadi salah satu cara untuk mengintegrasikan nilai-nilai nasionalisme. Proses pembelajaran dengan model PBL agar maksimal pendidik harus memiliki kompetensi wawasan yang

luas guna mendukung ketercapaian kompetensi dasar dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Agar pendidikan kewarganegaraan berjalan secara maksimal perlu menumbuhkan kultur demokratis di dalam kelas melalui pendidik yang demokratis terhadap peserta didik. Pendidikan kewarganegaraan dengan proses yang baik akan menciptakan warga negara muda yang memiliki kesadaran kebangsaan, sehingga menjadi modal mewujudkan masyarakat madani (*civil society*) di Indonesia pada era globalisasi. Tentunya dengan upaya mensinergikan pada situasi terkini, rasional, kontekstual dan internalisasi nilai-nilai Pancasila berlandaskan UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmorojati, Anom & Avanti Vera Risti P. (2018). Nationalism Understanding: Citizens' National Consciousness. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 251.
- Bunyamin, Maftuh, . (2008). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Nasionalisme Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *EDUCATIONIST* Vol. II No. 2 Juli 2008.
- Bria, M. E. (2018). Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Penguatan Semangat Nasionalisme di Daerah Perbatasan. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 38–43.
- Fakhriyah, F. (2014). Penerapan Problem Based Learning dalam Upaya Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, 3(1).
- Febriansyah, F. I. (2016). KONSEP PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. *PERSPEKTIF*, XXI(3), 220–229.
- Herman. R.G. dan Piccone, T.J. (2002). *Defending Democracy; A Global Survey of Foreign Policy Trends 1992-2002*. New York:Democracy Coalition Project.
- Kristiono, Natal. 2017. Pendidikan Generasi Muda dan Bela Negara (Konsep, Metode dan Implementasi). Researchgate.
- Lubis, B. P. M., & Harmawati, Y. (2018). WARGA NEGARA DAN MASALAH KONTEMPORER DALAM PARADIGMA PEMBANGUNAN. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(1), 71–78.

- Maksum, H. (2015). MODEL PROJECT CITIZENDALAM MENGEMBANGKAN SIKAP NASIONALISME BAGI MAHASIWA PGMI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH. *Pionir Jurnal Pendidikan*, 4(2), 1–11. <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v10i1.8379.g9057>
- Mall Online Indonesia. (n.d.). Keuntungan Menggunakan Produk Dalam Negri. <https://Mallonlineindonesia.Com/Keuntungan-Menggunakan-Produk-Dalam-Negri/>. Retrieved from <https://mallonlineindonesia.com/keuntungan-menggunakan-produk-dalam-negri/>.
- Morais dan Ogden (2011). Initial Development and Validation of the Global Citizenship Scale. *Sage Journals*
Volume: 15 issue: 5, page(s): 445-44.
- Nurhaidah, & Musa, M. I. (2015). DAMPAK PENGARUH GLOBALISASI BAGI KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA. *JURNAL PESONA DASAR*, 3(3), 1–14.
- Papadopoulos, N., A.Heslop, L., & Bamossy, G. (1990). A comparative image analysis of domestic versus imported products. *International Journal of Research in Marketing*, 7(4), 283–294. [https://doi.org/10.1016/0167-8116\(90\)90005-8](https://doi.org/10.1016/0167-8116(90)90005-8)
- Pujiriyani, D. W. (2013). RE-IMAJINASI KE-INDONESIA-AN DALAM KONTEKS ‘NETWORK SOCIETY. *Jurnal Komunitas*, 5(5), 151–161. Retrieved from <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas>.
- Setara Institute. (2019).
- Setiawan, D. (2017). Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Kontribusi Tingkat Pemahaman Konsepsi Wawasan Nusantara terhadap Sikap Nasionalisme dan Karakter Kebangsaan. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 24–33. <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v9i1.6457.g5659>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syaodih, E., & Agustin, M. (2008). *Bimbingan Konseling Untuk Anak Usia Dini*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- TIMES, I. (n.d.). 8 Produk Indonesia yang Sukses Go International, Bikin Bangga! Retrieved from <https://www.idntimes.com/food/dining-guide/yoshi/8-produk-indonesia-go-international-1/full>.
- Winataputra, Udin S & Dasim Budimansyah. (2007). *Civic Edocation: Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas*. Bandung Progam Studi Pendidikan Kewaganegaraan.